

INOVASI PELAYANAN PENDIDIKAN

**Studi kasus: Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep**

MARIA ULFA

Nomor Stambuk : 105610537715



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

INOVASI PELAYANAN PENDIDIKAN

**Studi kasus: Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh

MARIA ULFA

Nomor Stambuk : 105610537715

Kepada

05/10/2019

1 cap
Sub. Alumni

R/0240/ADN/1900
ULF

i

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Inovasi pelayanan Pendidikan
(studi kasus program sumbangan
pembinaan pendidikan gratis bagi
mahasiswa kabupaten pangkep)

Nama Mahasiswa : Maria Ulfa
Nomor Stambuk : 105610537715
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

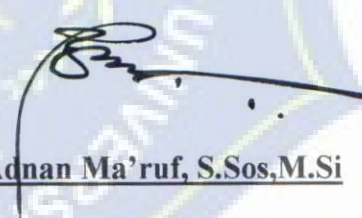
Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Abdul Mahsyar, M.Si



Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

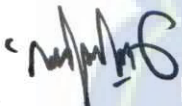
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0055/FSP/A.4-II/IX/41/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari senin tanggal 30 September tahun 2019.

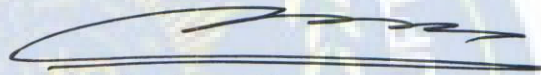
TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si(Ketua) (.....)
2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (.....)
3. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si (.....)
4. Dr. Hafiz Elfiansya, P, M.Si (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Maria Ulfa

Nomor Stambuk : 105610537715

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar 24 September 2019

Yang Menyatakan,


Maria Ulfa

ABSTRAK

Maria ulfa, 2019. *Inovasi Pelayanan Pendidikan (Studi Kasus: Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep)* (Dibimbing oleh Abdul Mahsyar dan Adnan Ma'ruf).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik Inovasi Pelayanan Pendidikan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian deskriptif yang bersifat menggambarkan karakteristik Inovasi Pelayanan Pendidikan.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling. Informan seluruhnya berjumlah empat belas orang masing-masing terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, mahasiswa penerima SPP gratis, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik inovasi pelayanan pendidikan di Kabupaten Pangkep sudah memenuhi lima karakteristik inovasi menurut Roger yaitu keuntungan relatif (*Relative advantage*) karena mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Pangkep. Tingkat Kesesuaian (*Compatibility*) karena sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Tingkat Kerumitan (*complexity*) karena memiliki tingkat kerumitan (*complexity*) lebih rendah dibanding tingkat kemudahan dalam program ini sehingga program ini direspon baik oleh masyarakat Kabupaten Pangkep. Kedapatdicobaan (*Triability*) karena program ini sebelum dijadikan program rutin di Kabupaten Pangkep pernah diujicobakan sebelumnya di daerah lain kemudian dilihat pengaruh dan manfaat yang ditimbulkan dan Tingkat Kemudahan Diamati (*Observability*) karena terbukti dengan beberapa daerah yang datang ke Pangkep untuk belajar bagaimana menerapkan program seperti ini dan melalui program ini ada nilai jual pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam peningkatan mutu pendidikan di daerahnya. Akan tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan waktu yang cukup lama atau belum efektif

Kata kunci: Inovasi, Pelayanan pendidikan, SPP gratis

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Inovasi Pelayanan Pendidikan (Studi Kasus: Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep) "

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.si selaku Pembimbing I dan Bapak Adnan Ma'ruf, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Ibu Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, S.Sos.,M.Si. yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Para dosen dan staf yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memotivasi dan berdiskusi dengan penulis hingga menyelesaikan program studi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara di UNISMUH Makassar.

6. Ucapan terima kasih kepada seluruh responden yang berada pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep, teman-teman Mahasiswa penerima program SPP gratis Kabupaten Pangkep, dan masyarakat kabupaten Pangkep atas kesediannya untuk membantu penulis dan bersedia untuk diwawancarai dalam rangka merampungkan penelitian.
7. Ucapan terima kasih yang teristimewa kepada Bapak H. M. Yahya dan Ibu Hj. Naharia selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan segala doa, semangat, dukungan moril dan kasih sayang sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Ucapan terima kasih banyak kepada Hj. Salma dan semua saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan moril terlebih dukungan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman – teman seperjuangan Sospol angkatan 2015 khususnya kelas ADN-D/E'15, terkhusus kepada Sriwahyuni yang senantiasa menemani dari maba sampai sekarang dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua crew CV. Citra Grafika yang selalu direpotkan oleh penulis dan selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis (Tati, Fira, Evi, Vira, Uni, Fitri, Novi, Umi) yang setia yang selalu memberikan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih juga kepada Syamsir yang telah memberikan semangat luar biasa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 24 September 2019



MARIA ULFA

DAFTAR ISI

Halaman pengajuan skripsi.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian, Konsep dan Teori	9
B. Kerangka Pikir	22
C. Fokus Penelitian	23
D. Defenisi Fokus Penelitian	24
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan lokasi penelitian	26
B. Jenis dan Tipe penelitian	26

C. Sumber Data	26
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Pengabsahan Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian	31
B. Hasil dan pembahasan	42
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian yang relevan.....	21
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	27
Tabel 4.1 Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Pangkep.....	32
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkep.....	33
Tabel 4.3 Jumlah Sekolah di Kabupaten Pangkep Tahun 2018/2019.....	36
Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Pendidik Kabupaten Pangkep Tahun 2019/2019.....	37
Tabel 4.5 Rekapitulasi Mahasiswa Penerima SPP Gratis Kabupaten Pangkep Tahun 2017.....	40
Tabel 4.6 Rekapitulasi Mahasiswa Penerima SPP Gratis Kabupaten Pangkep Tahun 2018.....	41
Tabel 4.7 Rekapitulasi Mahasiswa Penerima SPP Gratis Kabupaten Pangkep Tahun 2019.....	42
Tabel 4.8 Reduksi Data Keuntungan Relatif.....	43
Tabel 4.9 Reduksi Data Tingkat Kesesuaian.....	48
Tabel 4.10 Reduksi Data Tingkat Kerumitan.....	52
Tabel 4.11 Reduksi Data Kedapatdicobaan.....	56
Tabel 4.12 Reduksi Data Tingkat Kemudahan Diamati.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep.....	35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inovasi dalam sektor publik merupakan cara yang digunakan untuk mengatasi sistem dalam sektor publik yang masih kaku. Inovasi yang biasanya digunakan dalam dunia bisnis secara perlahan dimasukkan ke dalam lingkungan sektor publik (Suwarno, 2008). Inovasi pelayanan publik tidak bisa tidak dilakukan lagi termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik merupakan suatu yang sangat penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghasilkan pelayanan yang kompetitif dengan menggunakan konsep yang dikembangkan dalam sektor bisnis dalam dekade terakhir ini. Studi inovasi dikembangkan untuk meningkatkan dan mempertahankan keunggulan yang semakin kompetitif ini terutama dalam kemampuan bersaing pada suatu organisasi, seiring dengan berlalunya otonomi daerah inovasi pelayanan publik semakin berkembang (Mirnasari, 2013). Negara berkewajiban dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan memuaskan dengan harapan terciptanya kesejahteraan masyarakat dan menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah termasuk dalam bidang inovasi pelayanan publik terkhusus untuk masyarakat di daerah (Mulyadi, Dkk, 2018).

Inovasi merupakan suatu ide yang baru, baik yang berupa gagasan, praktek maupun objek terhadap suatu benda yang secara sadar dan serta dapat diterima sebagai suatu hal yang baru dan kreatif oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi (Rogers: 1983). Inovasi juga merupakan peluncuran sesuatu yang baru

dalam literatur administrasi publik, meskipun demikian sejak lahirnya New Public Management, perhatian terhadap konsep inovasi dalam administrasi publik mulai diterapkan dan menjadi hal yang penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik (Mulyadi, dkk, 2018: 75). Oleh karena itu agar inovasi dapat memberikan keyakinan terhadap keberhasilannya, mempertimbangkan karakteristik inovasi merupakan hal yang penting untuk menjadi dasar bagi adopter untuk terus mengembangkannya, sehingga kalkulasi akan inovasi mendapat gambaran yang produktif. Menurut Roger terdapat lima karakteristik inovasi yaitu, *Relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability* (Suharsaputra, 2016).

Dengan banyaknya permasalahan yang muncul dalam kinerja pelayanan organisasi publik, kondisi pemerintah yang berada berada dalam zona nyaman, berbagai urusan pemerintah sangat dinamis untuk ditangani segera, tuntutan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan bahwa inovasi dalam sektor publik penting untuk dilakukan LAN (Mulyadi, dkk, 2018). United Nation's Departement of Economic and Social Affairs (UNDESA) mengakui bahwa inovasi di sektor publik itu penting. Penghargaan ini dirancang dan dibuat sedemikian rupa untuk dapat meningkatkan peran, *visibility* serta profesionalisme kedalam pelayanan publik dengan menggunakan tiga kategori dasar yaitu perbaikan pelayanan publik, akuntabilitas, transparansi dan, dengan cara aplikasi ICT atau e-Government (Suwarno, 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk penyelenggaraan yang wajib

dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan inovasi daerah dalam meningkatkan prestasi kerja oleh penyelenggaraan pemerintah daerah sasaran inovasi daerah diarahkan agar mampu mewujudkan kesejahteraan bagi setiap lapisan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat seperti dengan melakukan pemberdayaan dan memberikan peran kepada masyarakat dalam peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah salah satunya berbentuk inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah khususnya inovasi pelayanan publik merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Indonesia sudah menduduki peringkat lebih baik lima tingkat dalam hal daya saing inovasi. Berdasarkan *Global Competitiveness Report* tahun 2017-2018 Indonesia berada pada peringkat ke 36 dari 137 negara yang bersaing dalam inovasi (<https://www.medcom.id>). Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan meraih penghargaan sebagai Top 99 inovasi pelayanan publik dan Sulawesi Selatan mampu menyisihkan 2.823 inovasi lainnya di Indonesia (<https://wartaekonomi.co.id>). Dengan adanya program *One Agency One Innovation* yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menciptakan minimal satu inovasi setiap tahun sehingga, tahun 2018 juga Kabupaten Pangkep meraih penghargaan karena, salah satu inovasinya dalam pelayanan pendidikan yaitu inovasi Kelas Perahu di Kabupaten Pangkep masuk dalam Top 40 inovasi pelayanan publik secara nasional. Dalam pencapaian ini inovasi tersebut

dipersiapkan oleh pemerintah untuk mewakili Indonesia berlaga pada event *International United Nation Public Service Award (UNPSA)* di Kanada (<https://parepos.co.id>).

Pendidikan sebagai salah satu bidang kehidupan yang sangat penting dalam masyarakat karena mampu memfasilitasi perubahan pada diri manusia menuju tingkat kematangan. Pendidikan merupakan sarana dalam meningkatkan potensi yang dimiliki oleh manusia. Perubahan yang cepat di era ilmu pengetahuan yang mengglobal inovasi pendidikan diakui sebagai cara yang penting dalam mengembangkan pendidikan suatu bangsa (Suharsaputra, 2016). Inovasi pendidikan di Indonesia dilakukan pada tahun 2015 adalah pembuatan sistem Ujian Nasional (UN) tidak lagi menggunakan kertas tetapi menggunakan sistem online. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di era digital lahir beberapa inovasi-inovasi di Indonesia; Siap Online; Qbaca; Qjurnal; English bean; Umeet Me; Indi School; Smart Campus Awards; Indi Learning. (<https://www.goodnewsfromindonesia.id>).

Pendidikan merupakan sarana yang dapat membangun manusia untuk berkepribadian lebih baik. Inovasi dalam sektor pendidikan merupakan suatu keharusan sehingga masyarakat harus siap untuk merespon waktu itu sendiri (Sofanudin, 2016). Ide inovatif dianggap mampu berkontribusi signifikan dalam pengelolaan pendidikan Islam menuju pencapaian yang berkualitas untuk upaya membuka faucet dana baru, dengan harapan semua sekolah Islam di Indonesia akan dilayani dalam bentuk pendidikan gratis dan juga berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, dan fasilitas pendidikan yang representatif (Siregar,

2017). Melalui penelitian sebelumnya dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yakni kriteria ukuran dan tujuan kebijakan, baik yang berupa sumber daya, komunikasi, karakteristik para agen pelaksana, sikap dan kecenderungan para pelaksana, aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, dan juga dalam lingkungan sosial dan politik bahwa dalam implementasi program sumbangan pembinaan pendidikan gratis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep sudah cukup baik pelaksanaannya (Zaenal, 2017). Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah Kabupaten Pangkep berdasar Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta beberapa Keputusan Bupati mengenai nama-nama penerima bantuan SPP Gratis. Program ini merupakan program andalan dan inovatif karena Kabupaten Pangkep merupakan daerah yang melayani pemberian SPP gratis kepada mahasiswa, pemerintah daerah juga memberikan kemudahan persyaratan dalam pelayanan program ini, memberikan peluang yang sama kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep untuk mendapatkan SPP, meskipun menempuh pendidikan di luar Kabupaten Pangkep.

Penelitian ini akan mendeskripsikan karakteristik inovasi menurut Roger (1983) yaitu, *Relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability* yang akan dijabarkan dalam kajian ini. Sehingga penelitian ini mengangkat judul:

“ Inovasi Pelayanan Pendidikan (Studi kasus: Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah yang akan dijadikan titik tolak dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana keuntungan relatif (*Relative advantage*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian (*compatibility*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimana kerumitan (*complexity*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep?
4. Bagaimana kedapatdicobaan (*trialability*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep?
5. Bagaimana kemudahan diamati (*observability*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keuntungan relatif (*Relative advantage*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep.

2. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian (*compatibility*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep.
3. Untuk mengetahui tingkat kerumitan (*complexity*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep.
4. Untuk mengetahui kedapatdicobaan (*trialability*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep.
5. Untuk mengetahui tingkat kemudahan diamati (*observability*) dalam Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara baik yang bersifat teoritis. Selain itu penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi para peneliti berikutnya atau tambahan referensi kepustakaan bagi yang berkepentingan, khususnya yang terkait dengan inovasi pelayanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini sebagai bentuk sumbangsi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dalam mengembangkan dan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Konsep dan Teori

1. Konsep dan Teori Pelayanan Publik

Dalam penyelenggaraan administrasi publik, pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia menjadi isu kebijakan yang semakin strategis disebabkan oleh perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan ditempat, sedangkan implikasi diketahui sangatlah luas dikarenakan menyentuh semua ruang kepublikan baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain.

Masyarakat masih diposisikan sebagai pihak “melayani” bukan dilayani keadaan ini diakibatkan masyarakat setiap saat selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari para birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan hal-hal seperti berbelit-belit, lamban, mahal, melelahkan, ketidakpastian (Mahsyar, 2011).

Pelayanan publik adalah melayani keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Di era modernisasi, pelayanan publik harus dapat berdasar pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan kepada semua pihak penerima pelayanan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 : “ Pelayanan publik adalah kegiatan atau

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik” (Mulyadi , 2016).

Dalam (Mulyadi Dkk, 2018) kebenaran pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi atau pelayan masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat beberapa komponen pelayanan yang harus diperhatikan, yang meliputi:

- a. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
- b. Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
- c. Biaya pelayanan dalam hal ini tarif pelayanan dan juga rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian layanan.
- d. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
- f. Berdasarkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap serta perilaku yang dibutuhkan kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan tepat.

Menurut Fitzsimmons dan Fitzsimmons (Mulyadi Dkk, 2018) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu memperhatikan beberapa aspek, yaitu:

- a. *Supporting Facilities*, berbagai infrastruktur yang harus tersedia sebelum suatu pelayanan publik tertentu dapat dilaksanakan atau ditawarkan kepada masyarakat.
- b. *Complimentary Products/services*, dokumen, maupun jasa-jasa lainnya yang harus disediakan, dibeli, atau digunakan oleh masyarakat pengguna layanan publik sebagai pelengkap memperoleh pelayanan publik tertentu.
- c. *Explicit Services*, wujud nyata sebagai substansi atau inti manfaat dari pelayanan publik yang diterima atau dirasakan oleh masyarakat.
- d. *Implicit services*, manfaat yang secara psikologis dapat dirasakan oleh masyarakat secara ekstrinsik dari suatu layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Menurut Sadu Wasistiono pemerintah mempunyai tugas pokok yang penting yaitu memberikan pelayanan umum kepada publik/masyarakat (Istianto, 2011). Kualitas pelayanan publik yang didapatkan masyarakat merupakan penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah., karena kualitas pelayanan publik penting dan dampaknya langsung bisa dirasakan dari semua lapisan masyarakat, ketika pelayanan publik mampu dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel maka pemerintah akan mendapat citra positif di mata

masyarakat. Hal ini yang menjadikan pelayanan publik menjadi alat ukur kinerja pemerintah yang kasat mata (Mulyadi, 2016).

2. *Good Governance*

United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "*Governance for Sustainable Human Development, January 1997*" menyebutkan pengertian governance adalah "*Governance is the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the wellbeing of their population*" (Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat) (Anggara, 2016).

Good governance adalah pemerintahan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2016).

Dalam buku Ilmu Administrasi Negara (Anggara, 2016) pemerintahan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas mengandung arti adanya kewajiban pemerintah bertanggung jawab dan bertanggung gugat atas semua tindakan dan kebijakan yang sudah ditetapkannya.

- b. Transparansi Pemerintahan adalah pemerintahan yang baik dan bersifat transparan terhadap masyarakat, baik dalam tingkat pusat maupun daerah.
- c. Keterbukaan Prinsip ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
- d. Aturan hukum (*rule of law*) Prinsip ini mengandung arti pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam hal ini diperlukan peningkatan dan penerapan sistem yang bertanggung jawab dengan baik, tepat, jelas, serta legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan dapat berlangsung dengan berdayaguna, berhasil, dan bertanggung jawab, serta bebas dan Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Sedarmayanti, 2012).

3. Inovasi

Menurut Asian Development Bank, Inovasi adalah sesuatu yang baru dapat diimplementasikan, dan memiliki dampak menguntungkan. Inovasi bukan sebuah kejadian ataupun aktivitas ; inovasi adalah konsep, proses, penerapan. Dan kapabilitas yang menentukan kesuksesan dalam organisasi. Dengan adanya

inovasi sektor publik dapat terbantu dalam membuat nilai untuk masyarakat (Junior, 2016).

Inovasi berarti mengenalkan hal-hal yang baru, baik itu produk, ide, objek maupun metode yang akan berdampak pada perubahan. Perubahan terjadi akibat diperkenalkan dan diterapkannya sesuatu yang baru, dengan kebaruan terjadi penyesuaian-penyesuaian dalam interaksi sehingga akan mendorong pada perubahan dalam interaksi tersebut. Inovasi merupakan suatu perwujudan dari ide kreatif dalam upaya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan di masa depan. (Suharsaputra, 2013). Proses inovasi dirinci lebih dalam oleh De Jong & Den Hartog dalam (Djamrut, 2015) yaitu melalui empat tahapan:

- a. Melihat peluang, sebuah peluang muncul ketika ada masalah atau perosalan yang muncul atau merupakan suatu kesenjangan antara yang apa yang diharapkan dan realitanya. Maka dari itu perilaku inovatif dimulai dari keterampilan dalam melihat peluang.
- b. Mengeluarkan ide, ketika dihadapkan oleh suatu masalah atau dikemukakan sebagai masalah maka gaya berfikir konvergen yang digunakan adalah mengeluarkan ide sebanyak mungkin terhadap masalah yang ada. Dalam tahap ini kreativitas merupakan hal yang sangat diperlukan.
- c. Mengkaji ide, tidak semua ide yang dikeluarkan dapat dipakai, maka dilakukan kajian terhadap ide-ide tersebut. Gaya berfikir divergen atau mengerucut mulai diterapkan, salah satu dasar yang menjadi pertimbangan adalah seberapa besar ide tersebut mendatangkan

keuntungan dan kerugian. Ide yang realistis yang diterima, sementara ide yang kurang realistis dihilangkan atau dibuang. Kajian harus dilakukan secara terus menerus sampai ditemukan alternatif yang paling mempunyai probabilitas yang paling besar.

- d. Implementasi, dalam tahap ini keberanian dalam mengambil resiko sangat dibutuhkan. Resiko yang berkaitan dengan probabilitas kesuksesan dan juga kegagalan. Hal ini berkaitan dengan probabilitas untuk sukses disebabkan oleh kemampuan dalam mengontrol perilaku untuk mencapai tujuan atau berinovasi.

Dalam Muluk(2008) Mulgan dan Albury menjelaskan level inovasi (Hilda, 2014) yaitu:

- a. Inovasi *incremental* berarti inovasi terjadi untuk membawa perubahan-perubahan-perubahan kecil kepada suatu layanan yang ada. Umumnya sebagian besar inovasi yang ada dalam level *incremental* sangat jarang membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan juga hubungan keorganisasian.
- b. Inovasi *radikal* merupakan perubahan yang mendasar dalam sebuah pelayanan publik atau mengenalkan sesuatu yang betul-betul baru terhadap proses keorganisasian dan pelayanan.
- c. Inovasi *transformatif* atau sistematis bisa membawa perubahan-perubahan dalam struktur angkatan kerja dan keorganisasian dan mentransformasi semua sektor serta secara dramatis mengubah keorganisasian. Inovasi seperti ini cenderung membutuhkan waktu

yang lama untuk dapat memperoleh hasil yang diinginkan dan yang membutuhkan perubahan yang mendasar dalam suatu susunan sosial, budaya dan organisasi.

Kuratko dan Hodget (Suharsaputra, 2016) menyebutkan perspektif sumber-sumber inovasi sebagai berikut:

- a. *Unexpected occurrence*, keberhasilan atau kegagalan yang tidak terantisipasi atau tidak direncanakan dapat menjadi kejutan inovasi bagi organisasi.
- b. *Incongruities*, ketika terjadi kesenjangan antara realitas dengan yang diharapkan akan mendorong munculnya inovasi untuk mengatasi hal tersebut.
- c. *Process needs*, kebutuhan akan suatu proses untuk lebih bermutu bisa menjadi sumber inovasi.
- d. *Industry and market changes*, inovasi juga bisa tumbuh karena terjadinya perubahan-perubahan dalam industri dan pasar, yang memunculkan peluang-peluang untuk dimanfaatkan.
- e. *Demographic changes*, perubahan penduduk dalam trend jumlah usia, pendidikan dan juga pekerjaan akan menjadi sumber yang mendorong inovasi.
- f. *Perceptual change*, perubahan dalam cara penafsiran atas fakta-fakta dan konsep-konsep akan mendorong perubahan mendasar dalam persepsi, mood dan makna yang akan diwujudkan, dituntut.

- g. *Knowledge-based concepts*, konsep-konsep berbasis pengetahuan akan menjadi sumber inovasi bila terus dikembangkan melalui cara pikir baru, metode baru, dan pengetahuan baru sebagai pengembangan dari berpikir ilmiah.

Roger (Suharsaputra, 2016) menyebutkan karakteristik inovasi sebagai berikut:

- a. *Relative advantage*, tingkat keuntungan relatif dari suatu inovasi. suatu inovasi bisa diterima jika dilihat mampu memberikan manfaat yang lebih besar dari apa yang diperoleh sebelumnya.
- b. *Compatibility*, menunjukkan tingkat kesesuaian antara inovasi dengan kondisi dan apa yang diharapkan masyarakat seperti faktor nilai, ide-ide yang telah diperkenalkan sebelumnya, serta apa yang dibutuhkan para adopter potensial.
- c. *Complexity*, merupakan tingkat kerumitan inovasi. Makin sederhana dan mudah dipahami suatu inovasi akan semakin mudah diterima oleh pengguna potensial inovasi, semakin rumit suatu inovasi maka akan sulit juga masyarakat untuk menerima inovasi tersebut. Inovasi perlu dilakukan formulasi dalam bentuk sederhana, karena semakin sederhana suatu inovasi semakin tinggi dan cepat diadopsi.
- d. *Trialability*, menunjukkan kedapatdicobaan suatu inovasi. suatu inovasi yang dapat dicoba dengan mudah maka dapat mempercepat penerimaan sebuah inovasi dalam masyarakat.

- e. *Observability*, menunjukkan tingkat dimana hasil inovasi dapat diamati, karena semakin mudah diamati sebuah inovasi maka semakin cepat masyarakat dapat menerima sebuah inovasi.

Karakteristik inovasi ini yang akan menjadi alat ukur yang digunakan untuk melihat Inovasi Pelayanan Pendidikan (Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Pangkep).

4. Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis

Pada dasarnya pendidikan gratis merupakan penyelenggaraan pendidikan yang tidak memungut biaya dari orang tua, semua kebutuhan operasional diupayakan lewat APBD, dan besaran dana dihitung sesuai unit cost setiap siswa. Untuk membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merupakan hak bagi warga negara, pemerintah memberikan kebijakan melalui upaya pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik di sekolah (Yuliana, 2015:4).

Dasar diberlakukannya pendidikan gratis adalah Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 berbunyi: 1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang dasar tanpa memungut biaya dan 2) wajib belajar merupakan sebuah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, hakekat kesejahteraan sosial adalah menjamin setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Pendidikan yang layak adalah salah-satu kebutuhan dasar bagi warga negara. Tekad pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa

juga menjadi pendorong dalam mewujudkan pendidikan untuk semua. Hal ini tidak terlepas dari persoalan menyangkut harkat dan martabat bangsa di mata dunia yang berkaitan dengan hak asasi manusia sehingga pemerintah membuat kebijakan pendidikan gratis di Indonesia. (Muhajidun, 2016:44).

Pergeseran transformasi kehidupan manusia akibat globalisasi, sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih menuntut pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manusia yang dilahirkan dari proses pendidikan sangat bergantung dari corak dan jenis pendidikan yang dijalankan. Corak dan jenis pendidikan akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah, peran masyarakat dan peran praktisi pendidikan. Namun demikian keterlibatan pemerintah sebagai salah satu aktor terpenting dalam peningkatan kualitas sumber daya pemerintah berada lebih dari keterlibatan masyarakat dan para praktisi pendidikan, karena hakekatnya kebijakan pemerintah menjadi dominian dalam menjalankan proses pendidikan (Mujahidun, 2016).

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pangkep membuat suatu program yang inovatif yaitu: penyelenggaraan program sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis bagi mahasiswa Pangkep dengan maksud untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai lembaga sosial yang kuat dan beribawa untuk memberdayakan warga Pangkep agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat (Zaenal, 2017).

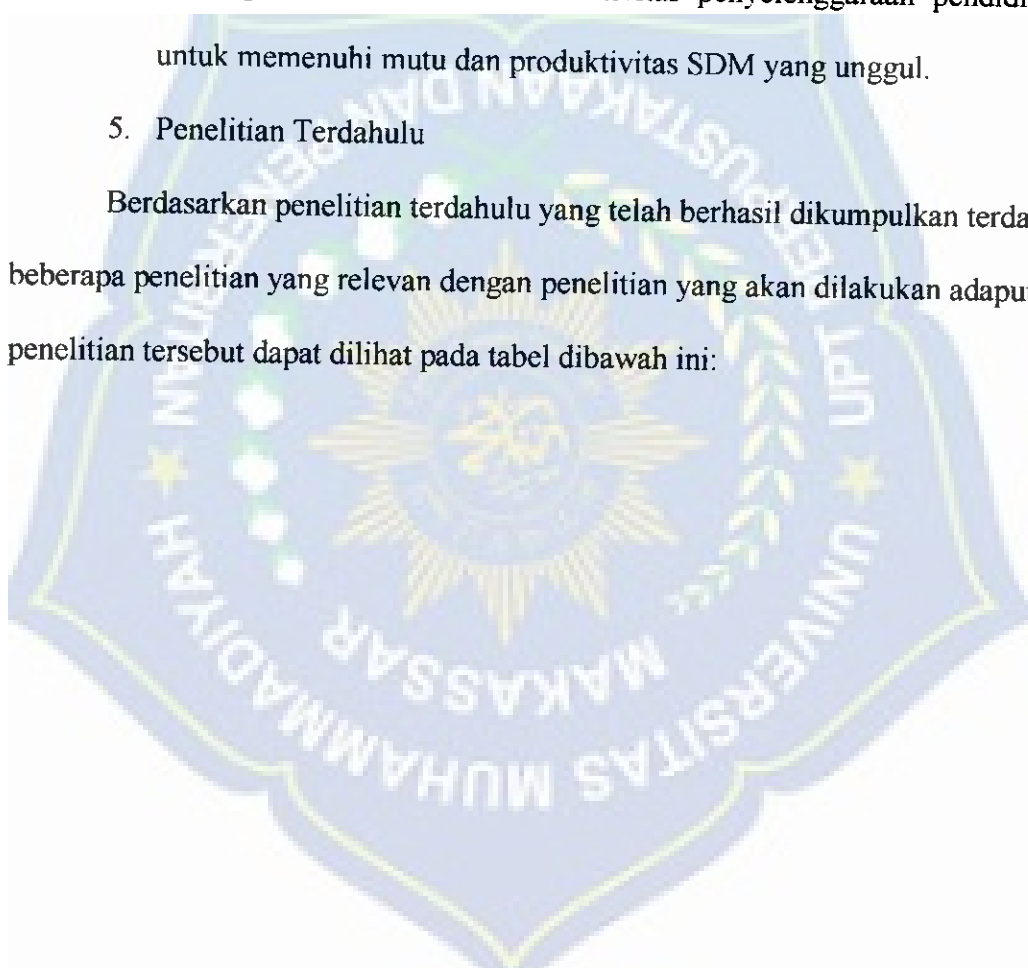
Adapun tujuan dilaksanakannya program tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi;

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai disiplin ilmu;
- c. Meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas SDM yang unggul.

5. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah berhasil dikumpulkan terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.1 Penelitian yang relevan

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Tujuan
1.	Zaenal	2017	Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep	Untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi Program Bantuan SPP Gratis bagi mahasiswa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
2.	Evan Suyono	2015	Inovasi Kebijakan pendidikan di Kota Palopo	untuk mengetahui gambaran akan level inovasi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah palopo dan untuk mengetahui jenis inovasi dari kebijakan tersebut serta untuk mengetahui tipe inovasi dari kebijakan yang dilaksanakan pemerintah kota Palopo
3.	Ladiatno Samsara	2013	Inovasi Pelayanan Paspur di Kantor Imigrasi (Studi Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Klas 1 Khusus Surabaya)	Menggambarkan kualitas layanan yang terkandung dalam kantor imigrasi Klas 1 khusus Surabaya

Sumber: Dikumpulkan dari beberapa penelitian terdahulu

Berdasarkan tabel 2.1 di atas maka penelitian ini memfokuskan pada inovasi pelayanan pendidikan yang menggunakan teori dari Roger (1983)

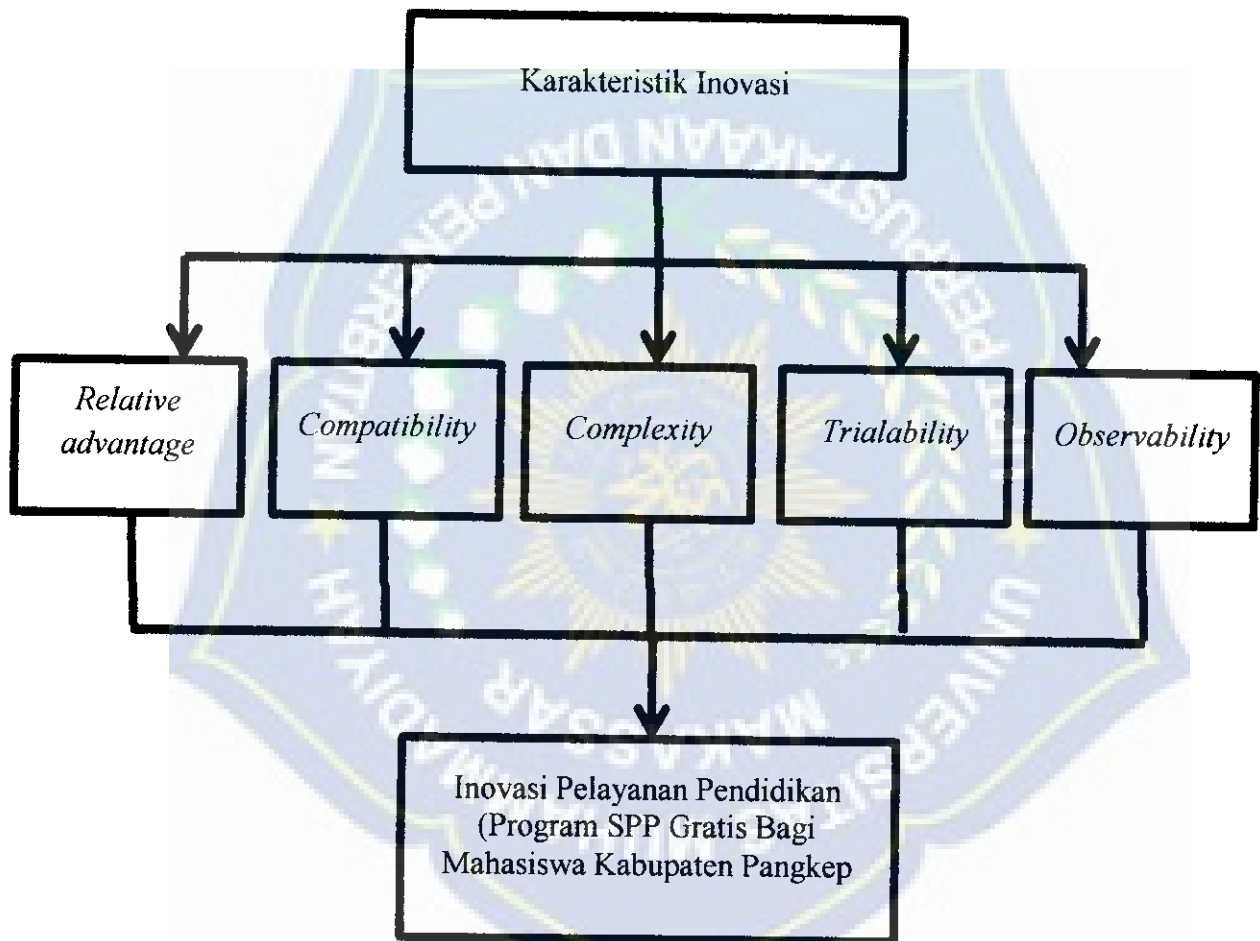
karakteristik inovasi yaitu, *Relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability* untuk mendeskripsikan Inovasi Pelayanan Pendidikan :Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan Gratis Bagi Mahasiswa Pangkep.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada tabel nomor satu terletak pada kajian yang akan diteliti dan tujuan dilakukannya penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada tabel nomor satu adalah terdapat pada program yang akan diteliti. Kemudian pada perbedaan penelitian ini dengan tabel nomor dua terletak pada program yang akan diteliti dan tujuan dilakukannya penelitian. Namun, Penelitian ini dengan penelitian pada tabel nomor dua juga memiliki persamaan yang terletak pada bidang kajian yang akan diteliti yaitu inovasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada tabel nomor tiga juga terletak pada kajian yang akan diteliti dan tujuan dilakukannya penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada tabel nomor tiga terletak pada bidang kajian yang akan diteliti yaitu inovasi.

B. Kerangka Pikir

Kabupaten Pangkep melaksanakan program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep. Tujuan dari program ini adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai lembaga sosial yang kuat dan beribawa untuk memberdayakan warga pangkep agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat (Zaenal, 2017). Hal ini merupakan suatu inovasi dalam pelayanan publik khususnya dalam sektor

pelayanan pendidikan. maka dari itu peneliti ingin mengetahui karakteristik inovasi menurut Roger (1983) yaitu, *Relative advantage*, *compatibility*, *complexity*, *trialability*, dan *observability*.



Gambar 2.1: Kerangka Pikir

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada inovasi pelayanan pendidikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, bahwa inovasi daerah merupakan semua bentuk penyelenggaraan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah.

D. Defenisi Fokus Penelitian

1. Inovasi pelayanan pendidikan adalah suatu ide yang baru berupa gagasan maupun objek yang dirasakan secara sadar dan dapat diterima di masyarakat sebagai sesuatu yang baru dalam pelayanan pendidikan.
2. Karakteristik inovasi adalah faktor yang menentukan apakah inovasi bisa diterapkan atau tidak.
3. *Relative advantage*, adalah tingkat keuntungan relatif dari suatu inovasi. ketika sebuah inovasi mampu memberikan manfaat yang tinggi maka akan mempercepat kemungkinan untuk diadopsi.
4. *Compatibility*, tingkat kesesuaian antara inovasi dengan kondisi dan harapan masyarakat, perlu adanya pertimbangan faktor sosial budaya ditempat dimana inovasi akan diterapkan.
5. *Complexity*, menunjukkan sikap kerumitan inovasi. makin sederhana suatu inovasi maka besar kemungkinan inovasi itu cepat diadopsi.
6. *Trialability*, adalah karakteristik yang menunjukkan kedapatdicobaan suatu inovasi. Semakin dapat dicobakan suatu inovasi maka semakin cepat dapat diadopsi.
7. *Observability*, adalah menunjukkan tingkat dimana hasil inovasi dapat diamati. Semakin mudah diobservasi hasil suatu inovasi semakin tinggi dan cepat diadopsi.
8. Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep merupakan program handal yang dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten pangkep dengan tujuan untuk mewujudkan sistem

pendidikan sebagai lembaga sosial yang kuat dan beribawa untuk memberdayakan warga pangkep agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat (Zaenal, 2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan Juni sampai Agustus 2019. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pangkep tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep karena merupakan pelaksana utama program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan Jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan mengenai inovasi pelayanan pendidikan: program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep.

2. Tipe Penelitian

Kemudian tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan tipe deskriptif dan studi kasus yakni penelitian yang dilakukan secara mendalam dengan fokus pada inovasi pelayanan pendidikan: program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep.

C. Sumber Data

1. Data primer

Data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang program gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep.

2. Data sekunder

Data sekunder yang didapatkan bersifat informasi tertulis. Peneliti mengumpulkan data yang berasal dari internet, dan data- data yang berasal dari selayang pandang Kabupaten Pangkep dan juga data-data yang berasal dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep mengenai topik penelitian.

D. Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan secara porpositive sampling, yitu memilih langsung informan yang lebih mengetahui tentan apa yang akan diteliti. Informan dalam penelitian adalah mereka-mereka yang terlibat dalam inovasi pelayanan pendidikan: program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep adapun informan penelitian ini adalah:

Tabel 3.1: Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Inisial	Jumlah
1.	Muslimin Yusuf S.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep	MS	1
2.	Dra.Hj. Rosna Umar	Kepala seksi kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep	RS	1
3.	Nurbayati S.S	Staff seksi kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep	NB	1
4.	Yugi	Staff seksi kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep	YG	1
5.	Riskawati	Mahasiswa	RK	1
6.	Aidil Ridwan Rauf	Mahasiswa	AR	1
7.	Evi Elvira	Mahasiswa	EV	1
8.	Shavira Tenri waru	Mahasiswa	ST	
9.	Andi Wahyuni Rukyan	Mahasiswa	AW	1
10.	Sri Wahyuni	Mahasiswa	SW	1
11.	Fitri Rosnawati	Mahasiswa	FR	1
12.	Neliyana Alimuddin S.Pd	Masyarakat	NL	1
13.	Riska Arifin	Masyarakat	RA	1
14.	Nur Azmi	Masyarakat	AZ	1

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti, yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Peneliti melakukan observasi dengan datang langsung ke lokasi yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang jelas. Observasi langsung ini akan dilakukan dengan cara formal dan informal untuk mengamati berbagai peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep.

2. Wawancara langsung

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian adalah wawancara secara langsung dan mendalam untuk mendapatkan informasi. Menggunakan pertanyaan yang terstruktur dan tidak terstruktur dengan informan secara mendalam terkait inovasi pelayanan pendidikan: program SPP bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep. Dalam proses wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti , buku tulis dan pulpen, serta handphone yang dipakai merekam suara, agar proses wawancara dapat berjalan dengan lancar untuk memudahkan peneliti mengingat kembali hasil wawancara saat penulisan dalam satu bentuk karya ilmiah.

3. Dokumentasi

Data-data yang didapatkan oleh peneliti yang berkaitan dengan objek peneliti didapatkan dari sumber buku dan data yang tersimpan dalam website, majalah, artikel, , UU, dan media informasi terkait

dengan inovasi pelayanan pendidikan: program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep.

F. Teknik Analisis Data

Aktivitas menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak mulai dari catatan lapangan, komentar-komentar dari informan, gambar, dokumen-dokumen lainnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian singkat.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Keabsahan Data

Moleong (2014) Pengabsahan data adalah bentuk batasan yang terkait dengan suatu kepastian apakah data tersebut benar benar valid atau tidak. Pengabsahan data juga digunakan untuk mengecek kebenaran atas temuan hasil penelitian dengan fakta di lapangan.kemudian. Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu : Triangulasi

Sumber yang berarti untuk mendapatkan data bukan hanya dari sumber melainkan dari artikel, jurnal dan website. Triangulasi Teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Triangulasi waktu berarti peneliti menggunakan waktu dalam teknik pengumpulan data berkisar pagi, siang maupun sore.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian digunakan untuk memberikan pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti oleh peneliti lebih lanjut berikut gambaran mengenai Kabupaten Pangkep dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep.

1. Gambaran Umum Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkep (Pangkajene dan Kepulauan) Provinsi Sulawesi Selatan dikenal dengan julukan Kabupaten “Tiga Dimensi”. Kabupaten Pangkep merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai keragaman dimensi wilayah yaitu: wilayah daratan, pegunungan dan kepulauan. Menjadikan kabupaten ini mempunyai cakupan yang sangat luas dan terbentang dari perairan hingga ke pegunungan.

Kabupaten Pangkep terletak antara 110° BT dan 4°, 40° LS sampai dengan 8° 00 LS atau terletak di pantai barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Madura, NTT, NTB dan Bali.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, 9 kecamatan terletak di daratan dan 4 kecamatan terletak di kepulauan dengan luas

wilayah 1.112,29 Km² dan berjarak 51 Km dari Kota Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Minasatene, Marang, Segeri dan Maddalle. Wilayah pegunungan Kecamatan Balocci dan Kecamatan TondongTallasa. Wilayah kepulauan terdiri dari empat Kecamatan Liukang Tangaya, Kecamatan Liukang Kalmas, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara. Data pulau yang berada di Kabupaten Pangkep, yaitu: jumlah pulau 115 pulau terdiri dari pulau berpenghuni 73 pulau dan yang tidak berpenghuni 42 pulau.

Tabel 4.1: Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Pangkep

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan
1.	Liukang Tangaya	8	1
2.	Liukang Kalmas	6	1
3.	Liukang Tupabiring	7	2
4.	Liukang Tup. Utara	7	-
5.	Pangkajene	-	9
6.	Minasatene	2	6
7.	Balocci	1	4
8.	Tondong Tallasa	6	-
9.	Bungoro	5	3
10.	Labakkang	9	4
11.	Marang	6	4
12.	Segeri	2	4
13.	Mandalle	6	-
	Pangkep	65	38

Sumber: Selayang Pandang Pemerintah Kabupaten Pangkep tahun 2019

Jumlah penduduk di Kabupaten Pangkep dari 13 kecamatan yang ada adalah sebanyak 361.318 orang, dari jumlah tersebut terdiri dari 177.700 orang pria dan 183.618 orang wanita. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2: jumlah penduduk Kabupaten Pangkep

No	Kecamatan	Pria 2(jiwa)	Wanita (jiwa)	Penduduk (jiwa)
1.	Liukang Tangaya	9.593	9.869	19.426
2.	Liukang Kalmas	7.372	7.491	14.863
3.	Liukang Tupabiring	9.066	9.029	18.095
4.	Liukang Tup. Utara	7.133	7.250	14.383
5.	Pangkajene	24.164	24.886	49.050
6.	Minasatene	19.482	20.250	39.732
7.	Balocci	8.575	8.733	17.308
8.	Tondong Tallasa	5.163	5.420	10.583
9.	Bungoro	21.872	22.472	43.344
10.	Labakkang	26.721	28.305	55.026
11.	Marang	18.264	18.811	37.075
12.	Segeri	12.536	12.994	25.530
13.	Mandalle	7.759	8.108	15.867
	Jumlah	177.700	183.618	361.318

Sumber: Dinas Catatan Sipil & Kependudukan (Selayang Pandang Kabupaten Pangkep 2019)

Kabupaten Pangkep terletak di pesisir pantai Barat Sulawesi Selatan yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73.721 ha, membentang dari garis pantai barat ke timur terdiri dari persawahan, tambak, rawa-rawa dan empang. Sedangkan daerah pegunungan dengan ketinggian 100-

1000 meter di atas permukaan terletak di sebelah timur batu cadas dan sebagian mengandung batu bara serta berbagai batu lainnya.

Temperatur udara di Kabupaten Pangkep berada pada kisaran 21° sampai dengan 31° atau rata-rata $26,4^{\circ}$ C. Keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang. Tempat pendeteksian curah hujan berada di stasiun Tabo-Tabo, Leang Lonrong dan stasiun Segeri. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi mencapai 640/131 hari hujan berdasarkan catatan dari stasiun Tabo-Tabo dengan kelembapan yang tidak merata.

2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Dinas Kabupaten Pangkep berada di Jl. Andi Mappe Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro (poros Pangkep-Pare-pare), Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan (90615).

a. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

“Mewujudkan Layanan Pendidikan Prima Yang Bermutu” Visi yang dimaksud mengandung arti dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pembangunan pendidikan menjadi upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mendasar dalam pembangunan SDM, pendidikan juga dapat dijadikan sebagai ukuran tingkat kemampuan berpikir seseorang. Bukan hanya itu tetapi masalah mutu pendidikan yang diselenggarakan sangat erat kaitannya dengan tingkat kerugian suatu daerah/ negara (<https://disdikpangkep.blogspot.com>).

b. Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan.
- 2) Meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan.
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda.
- 4) Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan

c. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep



Sumber: Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

d. Sektor Pendidikan di Kabupaten Pangkep

Sektor pendidikan di Kabupaten Pangkep mempunyai sarana sekolah SD negeri maupun swasta sebanyak 303 sekolah, sekolah SMP negeri maupun swasta sebanyak 89 sekolah, sekolah SMA negeri maupun swasta sebanyak 33 sekolah, dan sekolah SMK negeri maupun swasta sebanyak 14 sekolah dan di Kabupaten Pangkep juga menyiapkan sekolah luar biasa (SLB) untuk anak yang

berkebutuhan khusus sebanyak 2 sekolah masing-masing 1 negeri dan 1 swasta, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3: Jumlah sekolah di Kabupaten Pangkep tahun 2018/2019

No.	Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	JMLH
1.	Kec. Pangkajene	31	7	5	2	0	45
2.	Kec. Bungoro	30	8	3	3	1	45
3.	Kec. Labakkang	32	6	2	1	0	41
4.	Kec. Minasatene	26	6	1	3	1	37
5.	Kec. Ma'rang	29	5	2	0	0	36
6.	Kec. Balocci	19	4	2	1	0	26
7.	Kec. Segeri	23	4	1	1	0	29
8.	Kec. Liukang Tangaya	27	13	3	0	0	43
9.	Kec. Liukang Kalmas	18	13	3	0	0	34
10.	Kec. Liukang Tupabiring	17	9	3	0	0	29
11.	Kec. Tondongtallasa	15	5	1	1	0	22
12.	Kec. Liukang Tup. Utara	19	7	6	0	0	32
13.	Kec. Mandalle	17	2	1	2	0	22
	Total	303	89	33	14	2	441

Sumber: Subag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Sektor pendidikan di Kabupaten Pangkep mempunyai tenaga pendidik SD dan SMA/SMK serta SLB sebanyak 5356. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.4: Jumlah tenaga pendidik Kabupaten Pangkep tahun 2018/2019

No.	Wilayah	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	JML
1.	Kec. Pangkajene	436	248	176	45	0	905
2.	Kec. Bungoro	351	221	62	202	15	851
3.	Kec. Labbakkang	327	195	66	10	0	598
4.	Kec. Minatene	282	122	9	48	27	488
5.	Kec. Ma'rang	267	146	24	0	0	437
6.	Kec. Balocci	172	92	30	22	0	316
7.	Kec. Segeri	175	71	53	9	0	308
8.	Kec. Liukang Tangaya	154	89	25	0	0	268
9.	Kec. Liukang Kalmas	121	99	34	0	0	254
10.	Kec. Liukang Tupabiring	137	84	31	0	0	252
11.	Kec. Tondongtallasa	139	66	24	9	0	238
12.	Kec. Liukang Tup. Utara	145	63	19	0	0	227
13.	Kec. Mandalle	135	37	0	42	0	214
Total		2.841	1.533	553	387	42	5.356

Sumber: Subag Perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

3. Pelaksanaan Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis

Dewasa ini sudah nampak betapa beratnya untuk membangun pendidikan dalam era global, dengan melihat perkembangan globalisasi dan kondisi internal

pendidikan bangsa. Dengan kondisi pendidikan masih relatif rendah upaya untuk melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan untuk terus dilakukan, karena dituntut perlunya sikap inovatif untuk mampu bersaing di era globalisasi saat ini (Suharsaputra, 2016).

Pergeseran transformasi kehidupan manusia akibat globalisasi, sistem informasi dan komunikasi yang semakin canggih menuntut pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manusia yang dilahirkan dari proses pendidikan sangat bergantung dari corak dan jenis pendidikan yang dijalankan. Corak dan jenis pendidikan akan ditentukan oleh kebijakan pemerintah, peran masyarakat dan peran praktisi pendidikan. Namun demikian keterlibatan pemerintah sebagai salah satu aktor terpenting dalam peningkatan kualitas sumber daya pemerintah berada lebih dari keterlibatan masyarakat dan para praktisi pendidikan, karena hakekatnya kebijakan pemerintah menjadi dominian dalam menjalankan proses pendidikan (Mujahidun, 2016).

Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Pangkep membuat suatu program yang inovatif yaitu: Penyelenggaraan Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis bagi mahasiswa Pangkep dengan maksud untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai lembaga sosial yang kuat dan beribawa untuk memberdayakan warga Pangkep agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mendukung percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat (Zaenal, 2017).

Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep merupakan program unggulan Bupati Kabupaten Pangkep,

hal ini dilakukan karena pendidikan dianggap merupakan jembatan agar suatu bangsa dapat berkembang dan maju. Adapun tujuan dalam program ini adalah:

- a. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai disiplin ilmu;
- c. Meningkatkan relevansi pendidikan agar dapat mengikuti perkembangan global;
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi mutu dan produktivitas SDM yang unggul.

Bupati Kabupaten Pangkep melihat data bahwa lulusan SMA/SMK di Kabupaten Pangkep masih rendah yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga Bupati berfikir mungkin kendalanya adalah persoalan biaya. Bupati Kabupaten Pangkep menyampaikan bahwa semua alumni SMA/SMK harus diusahakan menjadi sarjana, persoalan biaya SPP adalah urusan pemerintah.

Dengan adanya Program ini dilihat bahwa jumlah mahasiswa setiap tahun mulai bertambah mulai tahun 2017 sampai 2019 sehingga setiap tahun pemerintah Kabupaten Pangkep menambah anggaran untuk program ini. Pada tahun 2017 kelompok sasaran penerima SPP gratis adalah mahasiswa angkatan 2013 sampai angkatan 2016, pada semester ganjil jumlah penerima 3489 orang dengan total anggaran Rp. 5.190.181.000 berbeda dengan semester genap jumlah mahasiswa penerima semakin meningkat yaitu 4066 orang dengan total anggaran Rp. 6.009.819.000, jadi total anggaran yang digunakan pada tahun 2017 adalah Rp. 11.200.000.000. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 5: Rekapitulasi mahasiswa penerima SPP gratis Kabupaten Pangkep tahun 2017

No	Tahun Angkatan	Semester	Jumlah Penerima	Jumlah SPP
1.	2013	VII	555	Rp. 707.967.000
2.	2014	V	865	Rp. 1.261.850.00
3.	2015	III	998	Rp. 1.493.704.000
4.	2016	I	1.071	Rp. 1.726.660.000
Total semester ganjil			3.489	Rp. 5.190.181.000
1.	2013	VIII	558	Rp. 709.582.000
2.	2014	VI	893	Rp. 1.293.005.000
3.	2015	IV	1.068	Rp. 1.601.829.000
4.	2016	II	1.149	Rp. 1.885.708.000
5.	Tambahkan		398	Rp. 549.695.000
Total semester genap			4.066	Rp. 6.009.819.000
Total ganjil dan genap		Rp. 5.190.181.000	Rp. 6.009.819.000	Rp. 11.200.000.000

Sumber: Seksi kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Pada tahun 2018 kelompok sasaran penerima SPP gratis adalah mahasiswa angkatan 2014 sampai angkatan 2017, pada semester ganjil jumlah penerima sebanyak 4501 orang dengan total anggaran yang digunakan adalah Rp. 5.905.000.000, dengan bertambahnya jumlah penerima sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep berinisiatif untuk membagi anggaran agar semua mahasiswa yang telah melakukan permohonan bisa mendapatkan SPP gratis ini dengan cara melalukukan pemotongan dana Rp. 300.000 per mahasiswa tetapi hal ini menuai pandangan negatif dari masyarakat terutama mahasiswa sehingga

pemerintah daerah menambah anggaran tersebut dan dibayarkan kembali pada semester genap adapun jumlah anggaran tambahan pada semester ganjil Rp. 1.110.882.000. Pada semester genap 2018 jumlah mahasiswa penerima SPP gratis sebanyak 4.277 orang dengan anggaran yang digunakan adalah sebanyak Rp.6.745.591.000, jadi total anggaran yang digunakan sepenuhnya pada tahun 2018 adalah 14.070.928.000. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.6: Rekapitulasi mahasiswa penerima SPP gratis Kabupaten Pangkep tahun 2018

No	Tahun Angkatan	Semester	Jumlah Penerima	Jumlah SPP
1.	2014	VII	809	Rp. 955.330.500
2.	2015	V	1.143	Rp. 1.434.870.000
3.	2016	III	1.287	Rp. 1.758.568.500
4.	2017	I	1.262	Rp. 1.756.231.000
Total semester ganjil			4.501	Rp. 5.905.000.000
1.	2014	VIII	693	Rp. 972.075.000
2.	2015	VI	1.009	Rp 1.564.182.500
3.	2016	IV	1.259	Rp. 2.020.562.000
4.	2017	II	1.316	Rp.2.188.771.500
Total semester genap			4.277	Rp. 6.745.591.000
Tambahan semester ganjil			194	Rp. 309.515.00
Kurang bayar semester ganjil				1.110.882.000
Total dana tahun anggaran 2018				Rp. 14.070.928.000

Sumber: Seksi kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

Pada tahun 2019 kelompok sasaran penerima SPP gratis adalah mahasiswa angkatan 2015 sampai angkatan 2018. Jumlah mahasiswa penerima SPP gratis pada tahun 2019 semakin meningkat dari tahun sebelumnya adalah sebanyak

5230 orang dengan total anggaran yang digunakan adalah Rp. 8.563.986.625.

Hasil ini bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.7: Rekapitulasi mahasiswa penerima SPP gratis Kabupaten Pangkep tahun 2019

No.	Tahun Angkatan	Semester	Jumlah Penerima	Jumlah Spp
1.	2015	VII	940	Rp. 1.145.537.500
2.	2016	V	1.302	Rp. 2.106.733.000
3.	2017	III	1.374	Rp. 2.297.133.500
4.	2018	I	1.615	Rp. 2.702.582.625
Total			5.230	Rp. 8.563.986.625

Sumber: Seksi kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep

B. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan teori Roger untuk melihat karakteristik inovasi yaitu: keuntungan relatif (*Relative advantage*), tingkat kesesuaian (*compatibility*), kerumitan (*complexity*), kedapatdicobaan (*trialability*), dan kemudahan diamati (*observability*) program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep maka akan diuraikan diuraikan dalam hal ini:

1. Keuntungan Relatif (*Relative advantage*)

Keuntungan relatif adalah suatu inovasi bisa diterima jika dilihat mampu memberikan manfaat yang lebih besar dari apa yang diperoleh sebelumnya (Suharsaputra, 2016). Teori Roger dalam keuntungan relatif, efektivitas menjadi

ukuran suatu kebaruan bisa diadopsi oleh karena itu ketika kebaruan ditetapkan maka pertimbangan manfaat menjadi penting dalam penerapan sebuah inovasi. Sub indikator yang dijadikan dalam keuntungan relatif adalah manfaat dan efektivitas. Maka penulis akan menampilkan hasil reduksi data tentang keuntungan relatif.

Tabel 4.8: Reduksi data keuntungan relatif

No	Informan	Keuntungan relatif	
		Efektivitas	Manfaat
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep	Belum	Membantu mahasiswa
2.	Mahasiswa penerima SPP gratis	Belum	Sangat membantu mahasiswa
3.	Masyarakat	Tidak ada informasi	Sangat membantu dalam pembayaran kuliah

Sumber: wawancara peneliti dengan informan

Penelitian menunjukkan Keuntungan relatif adalah adanya manfaat yang lebih besar yang diperoleh dari program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep namun pelaksanaan program ini belum efektif. Melalui observasi yang dilakukan peneliti bahwa pelaksanaan program SPP gratis ini belum tepat waktu meskipun sudah ada target waktu yang telah disepakati, hal ini disebabkan oleh pengimputan data yang terbilang lambat karena mahasiswa masih banyak yang

memasukkan berkas diakhir-akhir pengumpulan selain itu tahap validasi data yang juga membutuhkan waktu yang lama, karena para pegawai yang bertugas dalam program ini turun langsung ke kampus untuk membuktikan data yang dikumpulkan oleh setiap mahasiswa. Namun demikian program SPP gratis memiliki manfaat yang besar. Hal ini bisa dibuktikan dari wawancara peneliti dengan Kepala Seksi kurikulum SMP yang menangani SPP gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“sangat membantu supaya anak-anak tidak ada putus kuliah, meskipun tidak semua dibayarkan kalau misalnya 5 juta dikasi cuma 2 juta.” (Wawancara RS, 19 Juni 2019).

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh salah satu staff bagian seksi kurikulum SMP yang menangani SPP gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“membantu anak-anak yang hendak melanjutkan studi terbantu dengan biaya tidak terkandala lagi biaya SPP meskipun semuanya tidak terbantu”.(Wawancara NB, 01 Juli 2019).

Program SPP gratis ini memiliki manfaat yang cukup besar yaitu membantu mahasiswa dalam persoalan biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meskipun belum sepenuhnya biaya kuliah mereka dibayarkan hanya SPP nya saja sesuai dengan program SPP gratis ini.

Pernyataan ini juga dikemukakan oleh masyarakat melalui wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu masyarakat Pangkep:

“jelas ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, sangat membantu para orang tua di samping itu buat orang-orang yang tidak mampu, mereka bisa mengecam pendidikan juga sampai tingkat mahasiswa SI maupun DIII mereka-mereka bisa kuliah dengan SPP gratis yang diadakan oleh Pemerintah khususnya Kabupaten Pangkep.”(Wawancara NL, 27 Juni 2019)

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep ini memiliki manfaat yang sangat besar khususnya bagi mahasiswa yang berasal dari Pangkep, serta program ini juga lebih baik untuk kemajuan daerah Pangkep kedepannya karena program ini juga dinilai mampu meningkatkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Pangkep. Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Pangkep memperoleh penghargaan di bidang pendidikan dari Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, karena menjadi satu-satunya daerah pemberi beasiswa paling banyak di Indonesia. Hal ini dapat dijadikan sebagai suntikan motivasi kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dilihat dari data yang ada setiap tahunnya jumlah penerima SPP gratis semakin meningkat hal tersebut merupakan tanda bahwa semakin banyak tamatan SMA/SMK yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Mahasiswa juga tidak terbebani lagi dengan masalah pembayaran SPP persemester meskipun yang dibayarkan hanya maksimal dua juta rupiah. Peneliti juga melihat sebagian mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep sangat berharap pada program ini termasuk dari kalangan mahasiswa yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep pernyataan diatas diakui oleh mahasiswa yang berkuliah di Stikes Nani Hasanuddin angkatan 2017.

“sangat menguntungkan bagi kami mahasiswa yang sangat membutuhkan biaya tambahan untuk kuliah. Program ini sangat membantu orang tua kami masalah biaya kuliah kami tetapi pelaksanaanya belum efektif , karena rata-rata pemberian SPP nya setelah pembayaran SPP di kampus”(Wawancara RK, 30 Juni 2019).

Masyarakat tidak memberikan informasi terkait keefektifan program ini karena kecenderungan mereka tidak mengetahui mengetahui keefektifan program ini karena yang mengetahui persis tentang keefektifan pelaksanaan program ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep sebagai pelaksana program ini, selain sebagai pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep juga yang menentukan waktu pencairan SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep dan mahasiswa adalah sebagai sasaran dalam program ini. Pernyataan tentang pelaksanaan SPP gratis yang tidak efektif juga diutarakan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“membutuhkan waktu yang banyak, karena kita kemarin pengalaman karena sudah tahun kedua ini kita itu mulai buat pengumuman mulai dari akhir desember atau biasa paling minggu pertama januari di 2019 kita ambil contoh di januari itu kita sudah mengumumkan ke mahasiswa melalui media online, melalui persuratan ke mesjid-mesjid bahwa mulai januari sampai maret silahkan mahasiswa memasukkan kelengkapan administrasi untuk mendapatkan beasiswa SPP gratis nah dalam perjalanan tiga bulan itu terkadang kita sudah patot misalnya 30 maret tapi ternyata sampai disitu masih banyak yang belum akhirnya ditambah lagi makanya itu pencairannya kayak ini sudah bulan tujuh seandainya konsisten kemarin di bulan maret itu rampung semua sudah terdata semua mahasiswa sudah memasukkan berkas yang kita minta paling pencairan itu bulan lima sudah bisa cair tapi kenapa terlambat ini sampai bulan tujuh karena tadinya kita sudah patot maret sudah rampung ternyata dikasi waktu perpanjangan satu bulan masih saja belum masuk semua akhirnya kemarin ini kita bisa action nanti bulan lima baru bisa rampung”. (Wawancara MS, 05 Juli 2019).

Dari hasil wawancara informan diatas menunjukkan bahwa penyaluran dana SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep belum efektif karena masih membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengimputan data. Salah satu hal yang menyebabkan pengimputan data membutuhkan waktu yang lama yaitu beberapa mahasiswa belum memasukkan berkas yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Padahal ketika para mahasiswa memasukkan

dengan cepat bisa lebih mempercepat pencairan SPP gratis ini. Selain itu, tahap validasi ke kampus juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Seksi kurikulum SMP yang menangani SPP gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“masalah waktu saja kadang-kadang kalau banyak mahasiswanya tidak selesai satu hari, validasi di kampus ini membutuhkan waktu sampai tiga hari bagi kampus yang banyak mahasiswa dari Kabupaten Pangkep tapi kalau sedikit itu hari juga langsung diambil datanya. (Wawancara RS, 19 Juni 2019).

Peneliti menyimpulkan bahwa Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep memiliki keuntungan relatif (*relative advantage*) karena mempunyai manfaat yang sangat besar salah satunya pemerataan pendidikan di Kabupaten Pangkep untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkarakter dan unggul. Program ini mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Pangkep, meskipun pelaksanannya belum efektif karena disebabkan oleh berbagai faktor.

2. Tingkat Kesesuaian (*Compatibility*)

Menunjukkan tingkat kesesuaian antara inovasi dengan kondisi dan apa yang diharapkan masyarakat seperti faktor nilai, ide-ide yang telah diperkenalkan sebelumnya, serta apa yang dibutuhkan para adopter potensial (Suharsaputra, 2016). Teori Roger dalam tingkat kesesuaian dijelaskan bahwa dalam sebuah penerapan inovasi harus sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Maka penulis akan menampilkan hasil reduksi data tentang tingkat kesesuaian (*Compatibility*).

Tabel 4.9: Reduksi data tingkat kesesuaian

No	Informan	Tingkat Kesesuaian	
		Kondisi Kabupaten	Harapan
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep	Sesuai	Tamatan SMA/SMK tetap melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
2.	Mahasiswa penerima SPP gratis	Sesuai	Terus berlanjut
3.	Masyarakat	Sesuai	Terus dilaksanakan

Sumber: wawancara peneliti dengan informan

Di dalam penelitian menunjukkan tingkat kesesuaian adalah suatu inovasi yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat. Dalam hal ini apakah kondisi kabupaten sesuai dengan penerapan SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep. Sesuai pengamatan langsung yang dilakukan peneliti kondisi penerapan SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep sangat sesuai karena bisa dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang merespon baik atau memberi kesan positif dengan adanya program ini terutama mahasiswa. Mereka sangat antusias datang ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep memasukkan persyaratan untuk mendapatkan program tersebut, kemudian pada saat diumumkan bahwa SPP tersebut sudah bisa dicairkan pada hari pertama peneliti melihat kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep dipadati oleh mahasiswa, mereka rela antri untuk mendapatkan surat rekomendasi, meskipun

pengambilan rekomendasi bisa sampai tiga bulan kedepan. Selain mahasiswa, terlihat juga beberapa orang tua/ wali yang datang untuk mewakili anaknya dalam pengambilan surat rekomendasi.

Hal ini juga bisa dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“ kalau yang saya amati ini sebenarnya yang paling banyak menikmati program ini itu yang kuliah di Pangkep sendiri, seperti yang di STKIP, yang di Baru-baru yah Akbid ada juga yang sekolah agama itu STAI sangat bermanfaat termasuk saya di kampung itu terbantu sekali orang tua itu kan pembayarannya seperti STKIP itu sekitar dua jutaan, selama ikut dalam program ini orang tua itu sangat terbantu karena dia hanya pusing soal biaya transportasi apalagi yang punya motor Cuma biaya bensin. Kondisi penerapan SPP gratis ini yah artinya betul-betul sesuai apalagi kan saya lihat fenomena rata-rata kasian yang kuliah di STKIP atau STAI itu ekonomi-ekonomi yang menengah kebawah.” (Wawancara MS, 05 Juli 2019).

Pernyataan diatas bisa dikatakan bahwa kondisi Kabupaten Pangkep sangat sesuai dengan penerapan SPP gratis karena sebagian dari masyarakat Kabupaten Pangkep adalah masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah sehingga dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi mereka sangat terbantu dengan adanya program SPP gratis yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Pangkep. Program ini juga menjadi alat untuk menciptakan sumber daya manusia dalam berbagai disiplin ilmu di Kabupaten Pangkep.

Selain daripada kondisi ekonomi masyarakat, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Pangkep, pemerintah daerah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk program SPP gratis bagi mahasiswa, karena melihat kondisi kabupaten juga bisa dikatakan bahwa memang mampu melaksanakan program tersebut dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD). Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“Pangkep kan termasuk banyak Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) nya nda terlalu berasa” (Wawancara MS, 05 Juli 2019).

Tingkat kesesuaian dalam sebuah inovasi juga bisa dilihat dari harapan-harapan masyarakat. Dalam hal ini apa yang diharapkan dalam pelaksanaan program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep. Hal ini bisa dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa orang mahasiswa yang hampir sama harapannya, salah satu mahasiswa dari Universitas Muslim Maros angkatan 2016:

“harapan saya dalam program ini kedepannya tetap dilanjutkan walaupun periode bupati akan berakhir tetapi kami berharap program ini bisa dilanjutkan terus oleh bupati-bupati yang akan menjabat.”(Wawancara AR, 30 Juli 2019)”.

Pernyataan diatas dapat dikemukakan bahwa para mahasiswa berharap pelaksanaan SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep terus berjalan, meski diketahui program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep merupakan program andalan yang dicanangkan oleh Bupati yang menjabat saat ini. Mereka sangat berharap meskipun Kabupaten Pangkep tidak dipimpin lagi oleh H. Syamsuddin Hamid, SE program ini tetap berjalan dan dilanjutkan oleh bupati yang menjabat.

Harapan dalam program ini juga dikemukakan juga oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“program ini cukup berhasil karena terbukti dari data yang ada itu ada peningkatan jumlah mahasiswa yang kuliah, artinya jumlah alumni SMA/SMK yang lanjut ke perguruan tinggi itu meningkat dan program ini dianggap berhasil jadi kita berharap kedepan kalau perlu ini lebih ditingkatkan lagi.” (Wawancara MS, 05 Juli 2019).

Dari pernyataan diatas pemerintah daerah berharap dengan adanya program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep tidak ada lagi alumni SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, pemerintah daerah juga berharap agar kedepannya program ini bisa lebih ditingkatkan demi meningkatnya mutu pendidikan di Kabupaten Pangkep. Program ini juga dianggap berhasil karena dilihat dari data yang ada bahwa ada peningkatan jumlah mahasiswa penerima SPP gratis setiap tahunnya.

Melihat kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Pangkep yang masih banyak menengah kebawah, hal ini dianggap sebagai salah satu hambatan mereka untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Pangkep melihat bahwa APBD mencukupi untuk dikeluarkan program yang dianggap bisa menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Pangkep. Mahasiswa dan masyarakat serta pemerintah daerah berharap agar program ini tetap menjadi program andalan di Kabupaten Pangkep dan bisa untuk terus ditingkatkan agar masyarakat Kabupaten Pangkep bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Peneliti menyimpulkan bahwa Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep memiliki tingkat kesesuaian (*Compatibility*) karena sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat.

3. Tingkat Kerumitan (*complexity*)

Merupakan tingkat kerumitan inovasi. Makin sederhana dan mudah dipahami suatu inovasi akan semakin mudah diterima oleh pengguna potensial inovasi, semakin rumit suatu inovasi maka akan sulit juga masyarakat untuk menerima inovasi tersebut (Suharsaputra, 2016). Teori Roger dalam tingkat

kerumitan (*complexity*) menunjukkan bahwa inovasi akan diterima oleh masyarakat ketika mudah dipahami atau memiliki lebih banyak tingkat kemudahan di dalamnya. Maka penulis akan menampilkan hasil reduksi data tentang tingkat kerumitan (*complexity*).

Tabel 4.10: Reduksi data tingkat kerumitan

NO	Informan	Tingkat Kerumitan	
		Kerumitan pelaksanaan	Persyaratan
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep	Mudah ketika mengikuti prosedur	Melengkapi dokumen
2.	Mahasiswa penerima SPP gratis	Mudah	Melengkapi dokumen yang diminta
3.	Masyarakat	Tidak ada informasi	Tidak ada informasi

Sumber: wawancara peneliti dengan informan

Di dalam penelitian menunjukkan tingkat kerumitan adalah suatu inovasi yang diterapkan harus memiliki banyak kemudahan. Dalam hal ini bagaimana kerumitan yang dihadapi dan seperti apa dokumen yang harus disiapkan untuk memperoleh program SPP gratis. Hal ini bisa dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi kurikulum SMP yang menangani SPP gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“mahasiswa selama dia mengikuti aturan tidak ada tingkat kerumitan diterima semua” (Wawancara RS, 19 Juni 2019).

Dari pernyataan diatas artinya bahwa ketika mahasiswa mengikuti aturan dan melengkapi setiap berkas yang dijadikan persyaratan untuk mendapatkan SPP gratis ini tidak ada kerumitan, karena kerumitan yang dihadapi oleh staff pelaksana SPP gratis sebagian besar bersumber dari mahasiswa yang banyak memasukkan berkas pada tahap akhir pengumpulan berkas, sehingga para staff pelaksana program SPP gratis kewalahan dalam pengimputan data. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu staff bagian seksi kurikulum SMP yang menangani SPP gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“kadang mahasiswa nanti bermohon berbondong-bondong memasukkan proposal pada saat di akhir-akhir, jadi kerumitannya kita kewalahan menghadapi mereka”. (Wawancara YG, 02 juli 2019)

Masyarakat tidak memberikan informasi tentang kerumitan dan persyaratan untuk mendapatkan program SPP gratis ini dikarenakan mereka tidak mengetahui secara jelas kerumitan apa yang diperoleh untuk memperoleh dan melaksanakan SPP gratis ini dan apa saja yang menjadi aturan dalam program ini. Kerumitan dan persyaratan apa saja yang ada dalam program ini secara jelas diketahui mahasiswa sebagai penerima dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep sebagai pelaksana program ini.

Berkas yang dijadikan sebagai persyaratan untuk memperoleh SPP gratis dikemukakan oleh mahasiswa yang berkuliah di UIN Alauddin Makassar:

“pertama itu pengajuan proposal, dengan syarat surat keterangan aktif kuliah , kemudian foto copy slip pembayaran SPP, kemudian foto copy KTP, untuk waraga khusus dari daerah Pangkep kemudian foto copy KK, foto copy ijazah SD, sampai SMA dan foto copy krs, kemudian masih ada lagi transkrip nilai dan surat rekomendasi setelah ingin melakukan pencairan dana itu dengan syarat laporan penggunaan dana dan slip pembayaran SPP.” (Wawancara SW, 01 Juli 2019).

Dari pernyataan diatas disimpulkan bahwa syarat yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep cukup mudah, karena semua berkas yang dijadikan sebagai syarat sudah dimiliki oleh mahasiswa penerima. Mahasiswa hanya direpotkan dalam pengambilan surat keterangan aktif kuliah di kampus. Kemudian berkas tersebut dimasukkan ke dalam map *business file* dengan warna yang telah ditentukan dengan tahun angkatan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti tidak adanya struktur yang digunakan sebagai dasar pembagian tugas dalam mengimplementasikan program SPP gratis ini, tetapi untuk lebih memudahkan pelaksanaan program ini tetap ada pegawai yang diberikan wewenang untuk bertanggungjawab pada setiap angkatan. Jadi ketika mahasiswa datang membawa berkas yang telah dimasukkan ke dalam map *business file* diarahkan ke pegawai sesuai dengan tahun angkatannya.

Selain dari kemudahan berkas yang disiapkan, peneliti melakukan pengamatan langsung bahwa program SPP gratis ini memiliki tingkat kemudahan dalam pelaksanaannya, dalam pengumpulan berkas maupun pengambilan surat rekomendasi bisa diwakili oleh orang tua maupun wali dari mahasiswa. Untuk mendapatkan program SPP gratis ini syarat utamanya adalah hanya merupakan penduduk Kabupaten Pangkep dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep tidak menjadikan nilai IPK sebagai acuan dalam program ini, sehingga semua yang mahasiswa yang berasal dari Pangkep berhak mendapatkan SPP gratis ini tanpa terkecuali meskipun berasal dari keluarga yang mampu selama mereka memasukkan berkas yang telah ditetapkan dan tidak dalam masa cuti. Selain daripada itu dilihat bahwa di era zaman yang sangat modern ini penyampaian

pengumuman pengumpulan berkas dan pencairan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada saat ini yaitu pengumuman disampaikan melalui media online sehingga dengan sangat cepat para mahasiswa mengetahui pengumuman tersebut.

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep memiliki tingkat kerumitan (*complexity*) lebih rendah dibanding tingkat kemudahan dalam program ini, atau bisa dikatakan bahwa program ini memiliki lebih banyak kemudahan daripada kerumitan, sehingga program ini direspon baik oleh masyarakat Kabupaten Pangkep.

4. Kedapatdicobaan (*Triability*)

Triability menunjukkan kedapatdicobaan suatu inovasi. Suatu inovasi yang dapat dicoba dengan mudah maka dapat mempercepat penerimaan sebuah inovasi dalam masyarakat (Suharsaputra, 2016). Menurut Roger, inovasi yang tepat harus bisa diujicobakan kemudian menampilkan manfaat dan kerumitannya. Roger juga berpendapat bahwa suatu inovasi jika semakin bisa diujicobakan maka akan cepat diterima dalam masyarakat. Maka penulis akan menampilkan hasil reduksi data tentang kedapatdicobaan (*triability*).

Tabel 4.11: Reduksi data kedapatdicobaan

No	Informan	Kedapatdicobaan		
		Tahun dilaksanakan	Jumlah yang diterima	Peningkatan jumlah mahasiswa penerima setiap tahunnya
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep	2016 (diujicobakan) 2017-2019 (menjadi program rutin)	Sesuai SPP (maksimal 2juta/ orang)	Meningkat
2.	Mahasiswa penerima SPP gratis	2017-2019	Sesuai SPP (maksimal 2juta/ orang)	Meningkat
3.	Masyarakat	Tidak ada informasi	Tidak ada informasi	Tidak ada informasi

Sumber: wawancara peneliti dengan informan

Didalam penelitian menunjukkan kedapatdicobaan adalah suatu inovasi harus bisa diujicobakan sebelumnya. Program SPP gratis bagi mahasiswa pernah diujicobakan sebelumnya. Hal ini bisa dibuktikan oleh wawancara peneliti dengan Kepala Seksi kurikulum SMP yang menangani SPP gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“pernah kan anggaran gubernur dulu kemudian ditindaklanjuti di APBD dan Pangkep yang satu-satunya melanjutkan”. (Wawancara RS, 19 Juni 2019).

Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Sekretaris Dinas

Pendidikan Kabupaten Pangkep pada saat wawancara dengan peneliti :

“ini sebenarnya kalau program pertama itu merupakan janji politik pak gubernur kemarin dan dilaksanakan Cuma satu semester yaitu di semester ganjil, dan tidak semua mahasiswa diberikan artinya hanya diujicobakan, kemudian setelah itu pangkep kembali melanjutkan menggunakan APBD pangkep melaksanakan mulai 2017 sampai 2019 artinya sudah tiga tahun”. (Wawancara MS, 05 Juli 2019).

Dari pernyataan tersebut bahwa program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep sebelum menjadi program rutin pernah diujicobakan sebelumnya, program ini awalnya dilakukan di provinsi pada tahun 2014 kemudian pada tahun 2016 di ujicobakan di Kabupaten Pangkep. Program ini sedikit berbeda dengan program SPP gratis yang dilaksanakan di Provinsi, perbedaannya adalah di Kabupaten Pangkep tidak ada standar IPK yang dijadikan sebagai acuan untuk mendapatkan SPP gratis. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi kurikulum SMP yang menangani SPP gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“dilihat dari prestasinya waktu gubernur, kalau disini yang penting penduduk Pangkep”. (Wawancara RS, 19 Juni 2019).

Masyarakat tidak memberikan informasi terkait dengan kemapdicobaan program SPP gratis bagi mahasiswa karena mereka cenderung tidak mengetahui apakah inovasi ini pernah diujicobakan sebelumnya ataupun langsung dijadikan program rutin oleh pemerintah Daerah.

Setelah diujicobakan Program ini dinilai mampu memberikan pengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan dan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Pangkep sehingga pemerintah daerah menjadikan program ini sebagai program

rutin pada tahun 2017 sampai sekarang. Peneliti melihat data yang diperlihatkan oleh kurikulum SMP bahwa jumlah mahasiswa penerima SPP gratis setiap tahun mengalami peningkatan hal ini membuktikan bahwa program ini cukup berhasil, pengamatan langsung peneliti juga didukung oleh pernyataan yang dikemukakan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep pada saat wawancara dengan peneliti:

“tentu untuk mengetahui program ini apakah berhasil atau tidak tentu ada ukuran-ukurannya, ukurannya tentu kita melihat jumlah mahasiswa setiap tahunnya, jadi kita melihat program ini cukup berhasil karena terbukti dari data yang ada itu ada peningkatan jumlah mahasiswa yang kuliah”. (Wawancara MS, 05 Juli 2019).

Kemudian jumlah yang diterima setiap semester sesuai dengan SPP dikampus bagi yang memiliki pembayaran SPP kurang dari dua juta rupiah, berbeda bagi mahasiswa yang SPP nya lebih dari dua juta rupiah maka pemerintah daerah hanya memberikan SPP gratis senilai dua juta rupiah. Hal ini bisa dibuktikan oleh wawancara peneliti dengan salah satu mahasiswa dari Universitas Pasundan Bandung angkatan 2015:

“ berhubung SPP saya agak tinggi jadi saya menerima uang dua juta rupiah, yang saya ketahui mahasiswa yang mempunyai SPP dibawah dua juta penerimaan SPP nya sesuai dengan pembayaran SPP di kampus”. (Wawancara FR, 26 Juli 2019).

Peneliti menyimpulkan bahwa program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep sebelum dijadikan program rutin pernah diujicobakan sebelumnya kemudian dilihat pengaruh dan manfaat yang ditimbulkan, program ini juga bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pangkep dan kemudian program ini dijalankan tiga tahun berturut-turut.

5. Tingkat Kemudahan Diamati (*Observability*)

Menunjukkan tingkat dimana hasil inovasi dapat diamati, karena semakin mudah diamati sebuah inovasi maka semakin cepat masyarakat dapat menerima sebuah inovasi (Suharsaputra, 2016). Menurut Roger, semakin mudah diobservasi hasil suatu inovasi semakin tinggi dan cepat diadopsi. Maka penulis akan menampilkan hasil reduksi data tentang tingkat kemudahan diamati (*observability*).

Tabel 4.12: Reduksi data tingkat kemudahan diamati

No	Informan	Tingkat Kemudahan Diamati	
		Meningkatkan prestasi mahasiswa	Meningkatkan nilai jual pemda
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep	Tergantung dari mahasiswa	Bisa
2.	Mahasiswa penerima SPP gratis	Bisa	Bisa
3.	Masyarakat	Tergantung dari mahasiswa	Bisa

Sumber: wawancara peneliti dengan informan

Di dalam penelitian menunjukkan tingkat kemudahan diamati dalam program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep adalah dengan melihat peningkatan prestasi mahasiswa dan nilai jual pemerintah daerah dalam menjalankan program ini. Program SPP gratis ini dalam peningkatan prestasi ada perbedaan pendapat mahasiswa dan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep. Dari

pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep program ini dikatakan belum bisa meningkatkan prestasi mahasiswa karena tidak ada standar IPK yang menjadi syarat dalam program ini. Hal ini bisa dibuktikan oleh wawancara peneliti dengan staff bagian seksi kurikulum SMP yang menangani SPP gratis di Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“kalau itu prestasi saya kira ini karena ini kan bantuan ini diberikan bukan untuk mahasiswa yang berprestasi saja tidak ada kriteria, karena seandainya ada kriteria umpama IPK sekian banyak baru dia bisa dapat mungkin mereka berlomba, kalau ini tidak”. Wawancara YG, 02 Juli 2019

Dinas pendidikan juga tidak punya ukuran atau data prestasi mahasiswa penerima SPP gratis, mereka tidak punya tenaga untuk membandingkan prestasi mahasiswa sebelum dan setelah mendapatkan SPP gratis. Peningkatan prestasi mahasiswa tergantung dari mahasiswa itu sendiri kalau mereka termotivasi dengan program ini maka prestasinya meningkat. Pernyataan ini terbukti oleh wawancara peneliti dengan Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“yah kalau persoalan peningkatan prestasinya kita tidak punya ukuran untuk itu. Kalau bicara prestasinya yah saya kira itu kembali ke mahasiswanya kita ndada datanya itu walaupun kita persyaratkan itu karena BPK itu minta nilai tapi kita nda ada ukuran maksudnya kita tidak punya tenaga untuk membandingkan nilai misalnya sebelum ada SPP gratis dan setelah ada, jadi kalau ini masalah nilai yah artinya ini realtif kita tidak punya ukuran indikator yang jelas.” (Wawancara MS, 05 Juli 2019).

Meskipun tidak ada data peningkatan prestasi mahasiswa tetapi mahasiswa menjadikan program ini sebagai motivasi untuk lebih giat berkuliah, seperti yang dikemukakan oleh mahasiswa yang berkuliah di Universitas Muslim Maros, angkatan 2016:

“saya bilang bisa jadi peningkatan prestasi karena sangat membantu bagi kami dan ini juga bisa menjadi motivasi-motivasi bagi kami mahasiswa untuk lebih meningkatkan.”

Dalam program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep prestasi bukan merupakan tujuan utama dalam program ini, melainkan Pemerintah Daerah menginginkan tidak ada lagi alumni SMA/SMK yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep, pemerintah daerah berharap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pangkep terus meningkat.

Masyarakat juga menanggapi bahwa ketika mereka menjadikan program tersebut sebagai motivasi maka secara langsung prestasi mereka bisa meningkat, semuanya kembali kepada mahasiswa itu sendiri bagaimana dalam menyikapi program ini. Program ini juga dinilai mampu meningkatkan nilai jual pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan, terbukti dengan mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep dianggap beruntung karena memiliki Pemerintah Daerah yang memperhatikan pendidikan Alumni SMA dan SMK nya dan juga beberapa penghargaan yang didapatkan oleh pemerintah daerah melalui program ini. Masyarakat beranggapan bahwa melalui program SPP gratis peningkatan mutu Pendidikan Kabupaten Pangkep semakin baik dan dapat ditiru dan mengharumkan nama Kabupaten Pangkep. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan salah masyarakat Kabupaten Pangkep:

“baik menurut saya sendiri hal ini sudah pasti karena mahasiswa lain merasa bahwa peningkatan mutu pendidikan Kabupaten Pangkep semakin baik dan dapat ditiru dan mengharumkan nama Kabupaten Pangkep itu sendiri”.
Wawancara AZ, 27 Juni 2019.

Pernyataan masyarakat diatas juga didukung oleh pernyataan salah satu mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar angkatan 2015:

“iya mampu karena Pemerintah daerah Pangkep sudah terkenal dikalangan mahasiswa termasuk juga mhasiswanya yang berasal dari daerah lain sudah mengenal bahwa Pangkep sudah menyalur APBDnya untuk kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dan merupakan Kabupaten pertama di Sulawesi Selatan yang melaksanakan SPP gratis ini seperti ini”. Wawancara SW, 01 Juli 2019.

Selain daripada itu peningkatan nilai jual juga dilihat dari sudah banyak daerah yang datang berguru dalam menerapkan Program SPP gratis seperti ini. Daerah lain mempunyai keinginan juga melaksanakan program seperti ini, program ini sebelum dilaksanakan harus kordinasi ke Kementrian Keuangan, ke Kejaksaan dan semua pihak dilibatkan untuk membicarakan kasus hukumnya. Dan pelaksanaan program ini diaudit internal oleh inspektorat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Seperti yang dikemukakan oleh Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep:

“ sebagai motivasi yah betul baru di tahun pertama itu sudah beberapa Kabupaten datang kesini belajar bagaimana menjalankan program ini, karena daerah lain juga sebenarnya mampu, cuma persoalannya pejabat tentu perhitungan pertama itu masalah hukumnya rata-rata mereka itu sebenarnya punya keinginann untuk melaksanakan tapi takut tersangkut dengan hukum makanya kemarin kita di Kabupaten itu betul-betul sebelum kita laksanakan itu, kordinasi ke Kementrian Keuangan ke Kejaksaan dan semua pihak kita libatkan kita sharing bagaimana kasus hukumnya karena itu yang pertama dulu”. (Wawancara MS, 05 Juli 2019).

Peneliti menyimpulkan bahwa Program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep memiliki tingkat kemudahan diamati (*observability*), terbukti dengan beberapa daerah yang datang ke Pangkep untuk belajar bagaimana menerapkan program seperti ini. Nilai jual pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan juga dikenal oleh masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pangkep maupun dari luar Kabupaten Pangkep.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul penelitian yaitu Inovasi Pelayanan Pendidikan, studi kasus: (Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep) ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan:

Penulis dalam melihat Inovasi Pelayanan Pendidikan (Program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa Kabupaten Pangkep) menggunakan karakteristik inovasi yang terdiri dari lima indikator:

1. Keuntungan Relatif (*Relative advantage*)

Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep memiliki keuntungan relatif (*relative advantage*) karena mempunyai manfaat yang sangat besar. Program ini mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Pangkep, meskipun pelaksanaannya belum efektif.

2. Tingkat Kesesuaian (*Compatibility*)

Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep memiliki tingkat kesesuaian (*Compatibility*) karena sesuai dengan kondisi dan harapan masyarakat . pemerintah daerah Kabupaten Pangkep melihat bahwa APBD mencukupi untuk dikeluarkan program yang dianggap bisa menjadi solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan Kabupaten Pangkep. Mahasiswa dan masyarakat serta pemerintah daerah berharap agar program ini tetap menjadi program andalan di

Kabupaten Pangkep dan bisa untuk terus ditingkatkan agar masyarakat Kabupaten Pangkep bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

3. Tingkat Kerumitan (*complexity*)

Program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep memiliki tingkat kerumitan (*complexity*) lebih rendah dibanding tingkat kemudahan dalam program ini, atau bisa dikatakan bahwa program ini memiliki lebih banyak kemudahan daripada kerumitan, sehingga program ini direspon baik oleh masyarakat Kabupaten Pangkep.

4. Kedapatdicobaan (*Triability*)

Program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep sebelum dijadikan program rutin pernah diujicobakan sebelumnya kemudian dilihat pengaruh dan manfaat yang ditimbulkan, program ini juga bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pangkep dan kemudian program ini dijalankan tiga tahun berturut-turut.

5. Tingkat Kemudahan Diamati (*Observability*)

Program SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep memiliki tingkat kemudahan diamati (*observability*), terbukti dengan beberapa daerah yang datang ke Pangkep untuk belajar bagaimana menerapkan program seperti ini. Nilai jual pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan juga dikenal oleh masyarakat yang berasal dari Kabupaten Pangkep maupun dari luar Kabupaten Pangkep.

B. Saran

Dengan mencermati inovasi pelayanan pendidikan dalam hal ini program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep sebagai salah satu misi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep yaitu meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, maka beberapa saran yang diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep dan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkep agar pelayanan SPP gratis bagi mahasiswa Kabupaten Pangkep lebih baik kedepannya:

1. Diharapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep untuk lebih mengefektifkan waktu pelaksanaan Program SPP gratis bagi mahasiswa Pangkep sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya.
2. Diharapkan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan program ini untuk terus kuliah.
3. Bagi calon alumni SMA/SMK Kabupaten Pangkep diharapkan dengan adanya program ini tidak ada lagi yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan alasan kesulitan dalam hal biaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djamrut, Dayang Erawati. Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol 3 (III).
- Hilda, Nurul. 2014. Strategi Inovasi Layanan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol 2 (I).
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Junior, Marten Prasetyo. 2016. Inovasi Pelayanan Publik (Studi Kasus Perizinan Penanaman Modal di BPPT Kota Semarang). *Skripsi Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*.
- Mahsyar, Abdul. 2011. Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 1 (2).
- Mirnasari, Rina Mei. 2013. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol 1 (1).
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhajidun. 2016. Pemerataan Pendidikan Anak Bangsa: Pendidikan Gratis Versus Kapitalisme Pendidikan. *Jurnal Fakultas Agama Islam* Vol 7 (I).
- Mulyadi, Deddy,dkk. 2018. *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Rogers, Everett M. 1983. *Diffusion of Innovations*. London: Free Press.
- Samsara, Ladiato. 2013. Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi (Studi Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Klas I Khusus Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol I (I).
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Selayang Pandang Kabupaten Pangkep. 2019.

- Siregar, M. I. 2017. Inovasi Pendanaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam di Indonesia. *At-Ta'dib. Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 123-141.
- Sofanudin, Aji. 2016. Manajemen Inovasi Pendidikan Berorientasi Mutu Pada MI WAHID HASYIM Yogyakarta. *Cendekia. Vol 14 (2)*.
- Sugiharto, Indah Noviyanti, dkk. Inovasi Pelayanan Kesehatan (Proses Inovasi Jemput Bola di Puskesmas II Punggelan Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik. Vol 6 (III)*.
- Suharsaputra, Uhar. 2013. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharsaputra, Uhar. 2016. *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LAN, Jakarta.
- Suyono, Evan. 2015. Inovasi Kebijakan Pendidikan di Kota Palopo. *Skripsi Ilmu Administrasi Negara Universitas Hasanuddin*.
- Yuliana, Ratna. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis Pada Jenjang Sekolah Menengah di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang*.
- Zaenal. 2017. Implementasi Program Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Gratis Bagi Mahasiswa di Kabupaten Pangkep. *Skripsi Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Internet
- Ade. Raih Penghargaan Top 40, Ini Kata Bupati Pangkep. [Parepos.co.id](http://parepos.co.id). Diakses pada Tanggal 10 Maret 2019 pada Pukul 12.48.
- Kurniawan, Tri Yari. Sulsel Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018. <https://www.wartaekonomi.co.id>. Diakses pada Tanggal 10 Maret 2019 pada Pukul 12.12.
- Larasati, Citra. Daya Saing dan Inovasi Indonesia Naik Lima Peringkat. <https://www.medcom.id>. Diakses pada Tanggal 10 Maret 2019 Pukul 12.00.

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Maria Ulfa, disapa Ulfa. Lahir pada tanggal 30 November 1997 di Balocci. Anak bungsu dari enam bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri H. M. Yahya dan Hj. Naharia. Penulis menempuh pendidikan pertama di SD Negeri 04 Balocci Baru selama enam tahun dan selesai pada tahun 2009.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 01 Balocci dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Swasta Semen Tonasa dan selesai pada tahun 2015. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis Sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimbah Ilmu Pengetahuan yang nantinya dapat diamankan dan memberikan manfaat.